

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bahwa diketahui bersama, hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.<sup>1</sup>

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan

---

<sup>1</sup> S. Brudjonegoro Retnowati, *Ekologi Lingkungan*, BPFE Yogyakarta Yogyakarta, 2000, hal. 20.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 22.

apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Terdapat potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan, yang sejauh ini masih tergolong dalam kelompok masyarakat paling kurang sejahtera atau masyarakat miskin. Untuk mengelola potensi ini, peran penting berada di tangan pemerintah daerah. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, berkat desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan baru untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab untuk memberikan layanan-layanan, termasuk menanggulangi kemiskinan.<sup>3</sup>

Tetapi pemerintah daerah sering tidak memiliki data dan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan, memprioritaskan tindakan atau membidik kelompok miskin tertentu. Pemerintah daerah, yang di masa lalu sering diabaikan karena sistem perencanaan yang sentralistik, tidak memiliki cukup pengalaman dalam menyiapkan dan menerapkan rencana pembangunan daerah. Kondisi ini diperumit dengan tidak memadainya kewenangan, mandat dan sumber daya yang dialihkan ke daerah atau koordinasi antar-sektor yang lemah.

Terbatasnya akuntabilitas ke bawah membatasi kemauan politik pemerintah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 46.